

BAB IV

PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH DAERAH

4.1. PRIORITAS URUSAN WAJIB YANG DILAKSANAKAN

4.1.1 URUSAN LINGKUNGAN HIDUP

A. Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup

1. Kegiatan

1. Kegiatan Pemantauan Kualitas Air Sungai di Provinsi Papua, dengan anggaran sebesar Rp. 204.500.000,- realisasi anggaran sebesar Rp. 189.063.800,- atau 92,45%. Hasil dari kegiatan ini adalah mendapatkan data base dan tren kualitas air sungai yang telah dilakukan selama 3 tahun dengan memantau 18 titik pantau terdiri dari komponen temp, TDS, TSS, pH, BOD₅, COD, DO, NH₃N, Cl, F, NO₃N, NO₂N, PO₄P, SO₄, SH₂S, As, Fe, Cd, Cr, Mn, Hg, Pb, Cu, Zn, MBAS, M&L, Fenol, Cl₂, Fecal Coliform, Total Coliform sedangkan manfaat dari kegiatan ini adalah dapat diketahui status mutu air.
2. Kegiatan Peningkatan Kapasitas Komisi Penilai AMDAL Provinsi Papua, dengan anggaran 328.750.000,- realisasi anggaran sebesar Rp. 315.916.700,- atau 96,10%. Hasil dari kegiatan ini adalah dilaksanakan kegiatan sosialisasi kepada Komisi Penilai AMDAL kepada masyarakat adat di Kabupaten Sarmi sebanyak 100 orang dan studi lapangan ke PT. Musim Mas di Provinsi Riau dan Sumatra Utara sedangkan manfaatnya adalah memberikan kemampuan kepada masyarakat adat agar dapat mengawasi perusahaan dan Komisi Penilai Amdal Provinsi dalam mengkaji dokumen AMDAL.
3. Kegiatan RKL/RPL, dengan anggaran sebesar Rp. 299.750.000,- realisasi anggaran sebesar Rp. 190.727.200,- atau 63,63%. Hasil dari kegiatan ini adalah dilakukan pemantauan kepada 6 perusahaan namun tidak melaksanakan pemberian barang hibah kepada pihak ketiga khususnya bagi masyarakat adat yang terkena dampak oleh industry/dunia usaha. Manfaatnya agar perusahaan taat pada pengelolaan lingkungan pada wilayahnya.
4. Kegiatan Pemantauan Kualitas Udara Ambien, dengan anggaran 560.100.000,- realisasi anggaran sebesar Rp. 539.893.900,- atau 96,39%. Hasil dari kegiatan ini adalah dilaksanakan pengukuran pada 12 titik pantau yaitu sample udara,, kelembaban kecepatan angin, arah angin, tekanan udara, cuaca dan koordinat dengan sasaran road side, pemukiman/perkantoran/pendidikan dan pusat perdagangan/industry dilaksanakan di Kab. Jayapura, Kota Jayapura, Kabupaten

Mimika, Merauke, Nabire dan Biak Numfor. Sedangkan manfaatnya adalah mengetahui kualitas udara ambien di kabupaten/kota.

5. Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Adat Sadar Hukum Lingkungan dengan anggaran 153.759.350,- realisasi anggaran sebesar Rp. 86.259.350,- atau 56,10%. Hasil dari kegiatan ini dibentuknya 2 (dua) kelompok masyarakat adat sadar hukum lingkungan. Manfaat dari kegiatan ini adalah masyarakat adat mampu menjaga lingkungan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
6. Kegiatan Pengawasan Lingkungan Hidup, dengan anggaran Rp. 304.250.000,- realisasi anggaran sebesar Rp. 273.564.000,- atau 89,91%. Hasil dari kegiatan ini adalah dilaksanakan pengawasan lingkungan pada 5 perusahaan, mengikuti diklat PPLH sebanyak 2 orang dan kursus pengelolaan B3 dan pengendali limbah B3 sebanyak 2 orang sedangkan manfaatnya adalah agar perusahaan taat pada pengelolaan lingkungan dan meningkatnya kapasitas SDM dalam melaksanakan pengawasan lingkungan hidup.
7. Kegiatan Pembinaan Pemantauan dan Penilaian ADIPURA, dengan anggaran 342.600.000,- realisasi anggaran sebesar Rp. 325.003.000,- atau 94,86%. Hasil dari kegiatan ini adalah dilaksanakan pembinaan dan pemantauan ADIPURA pada 8 kabupaten dan menilai 6 kabupaten hal ini disebabkan karena 2 kabupaten tidak memenuhi persyaratan administrasi yang ditetapkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI, sedangkan manfaatnya adalah komitmen Pemerintah Kabupaten/Kota untuk menjaga kebersihan lingkungan di Kabupaten/Kota.

2. Permasalahan dan Solusi

(1) Permasalahan

- (a) Perusahaan wajib AMDAL yang dipantau sebanyak 60 perusahaan dan pada tahun 2015 hanya mampu mengawasi 11 perusahaan;
- (b) Pemantauan kualitas air dan udara ambien memerlukan SDM yang berkualitas dan peralatan pengujian yang baik serta laboratorium lingkungan yang terakreditasi dan saat ini BPLH Provinsi Papua baru memiliki 3 orang PPLHD, 5 orang PPNS, dan Laboratorium Lingkungan baru selesai dibangun dan masih dilengkapi dengan sarana dan tenaga analis yang berkompeten.
- (c) Belum dapat dilakukan pemantauan lingkungan sampai 29 Kabupaten/kota.

(2) Solusi

- (a) Perlu buka kelas untuk PPLHD di Provinsi Papua bagi pegawai yang akan melaksanakan pemantauan kualitas lingkungan.
- (b) Dipacu akreditasi laboratorium lingkungan Provinsi Papua.

3. Dokumentasi

➤ Dokumentasi Kegiatan Pemantauan Kualitas Air Sungai di Provinsi Papua Kabupaten Biak Numfor



Jalan menuju Lokasi Pengambilan Sampel di Sungai Korem & Sungai Wafor, Kab. Biak Numfor



Pengambilan Sampel dan Pengukuran Lapangan Kualitas air di Sungai Korem

Kabupaten Nabire



Pengukuran Lapangan Kualitas air di Hilir Sungai Nabire



Pengambilan sampel air di Hulu Sungai Nabire Kabupaten Nabire

➤ Dokumentasi Kegiatan Peningkatan Kapasitas Komisi Penilai AMDAL Provinsi Papua

Kabupaten Sarmi



Peserta Sosialisasi proses AMDAL di Kabupaten Sarmi



Peserta Sosialisasi proses AMDAL



Kepala Dinas PU Kab. sarmi memberikan masukan dan saran



Masyarakat serius mengikuti sosialisasi LH

➤ **Dokumentasi Kegiatan Pemantuan RKL / RPL di Provinsi Papua**



Pemrakasa sedang menjelaskan alur tanaman dan pengelolaan lingkungan



Lokasi dan Pembibitan Kelapa Sawit pada PT. Pusaka Agro Lestari



Lokasi Pabrik plawood.



Kayu jadi yang siap diekspor

➤ **Dokumentasi Kegiatan Pemantauan Kualitas udara Ambien**



Lokasi Kantor Bupati Kab. Jayapura



Lokasi : Depan Kampus Yapis Kota Jayapura



Lokasi : Depan Ruko Sentosa Merauke



Lokasi PLTD/PLN Rayon Timika



Lokasi Kantor Kelurahan Waupnor Biak



Lokasi Rumah Sakit Umum Daerah Nabire

➤ **Dokumentasi Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Adat Sadar Hukum Lingkungan**



Sedang mempersiapkan pertemuan dengan masyarakat



Materi Permen Lh No. 09 thn 2010 sedang disosialisasikan



Peserta sedang mengikuti sosialisasi



Sedang diskusi dengan masyarakat adat dan pegawai Bapedalda Paniai

➤ **Dokumentasi Kegiatan Pengawasan Lingkungan Hidup Kabupaten Mimika**



Pertemuan dengan Pihak Perusahaan



Sewage Treatment Plant 68 Tembagapura



Sewage Treatment Plant – 74



Sewage Treatment Plant Timika Indah

Kabupaten Merauke



Koordinasi dengan Kepala dan Sekretaris BLH Merauke



Kantor PT. Agrinusa Persada Mulia di Kebun Pupuk

Kabupaten Jayapura



Pertemuan dengan Pihak Perusahaan



Sumur Pantau 1 di Area Land Application

Kabupaten Mappi



Pembangunan Infrastruktur sebagai salah satu bentuk CSR



Logpond/pelabuhan untuk kebutuhan perusahaan

Foto Pelatihan Dasar-Dasar Pengawasan Lingkungan Hidup



Peserta Pelatihan Dasar-Dasar Pengawasan Lingkungan Hidup



Praktek Lapangan di PT. Pindo Deli Pulp & Paper Mills



Peserta Pelatihan Pengelolaan B3 dan Pengendalian Limbah B3



Peserta Pelatihan Menerima Materi dari Prof. Dr. Endang Tri Wahyuni

➤ **Dokumentasi Kegiatan Pemantauan dan Penilaian Adipura Kabupaten Merauke**



salah satu titik pantau pada program ADIPURA yaitu SD Inpres Folder Merauke



Lokasi TPA Kabupaten Merauke (lokasi lama dengan sistim open dumping)



Lokasi baru TPA yang sementara dalam pembangunan dengan sistim Land Fill



Salah Satu Titik Panntau Pada Pasar di Kabupten Merauke



Salah Satu Titik Pantau Pada Rumah Sakit di Kabupten Merauke



Salah Satu Titik Panntau Pada Terminal di Kabupten Merauke

Kabupaten Mimika



Salah Satu Titik Pantau Pada SD Integral Hidayatullah Timika



TPA Kabupaten Mimika



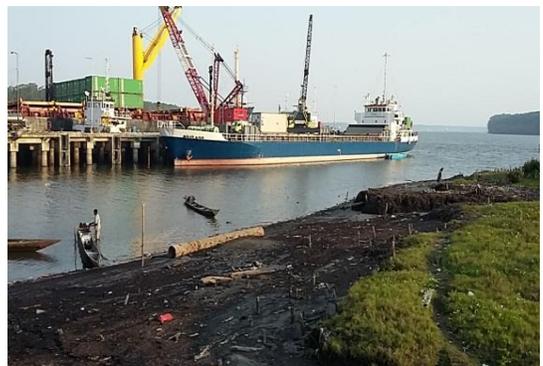
Terminal Kabupaten Mimika



Pasar Kabupaten Mimika



Bandara Kabupaten Mimika



Pelabuhan Kabupaten Mimika

Kabupaten Nabire



Sekolah Yapis Nabire



TPA Nabire



Taman Kota Mamay Kab. Nabire



Pasar Sentral Kalibobo Nabire



Pelabuhan Kabupaten Nabire



Rumah Sakit Nabire

B. Program Perlindungan dan Konservasi

1. Kegiatan

1. Pembinaan dan Penilaian Kalpataru, dengan anggaran sebesar Rp. 136.050.000,- realisasi anggaran sebesar Rp. 133.080.000,- atau 97,82%. Hasil dari kegiatan ini adalah dilakukan pembinaan bagi perorangan/kelompok peduli lingkungan untuk mendapatkan penghargaan Kalpataru dari Kementrian LHK RI di 2 Kabupaten namun tidak lakukan penilaian Kalpataru sedangkan manfaat dari kegiatan ini adalah agar memacu masyarakat peduli pada lingkungan.
2. Pemberdayaan Institusi Kemasyarakatan Dalam Penyelamatan Danau, dengan anggaran sebesar Rp. 210.000.000,- realisasi anggaran sebesar Rp. 203.750.000,- atau 97,02%. Hasil dari kegiatan ini adalah dilakukan pembersihan enceng gondok di 2 (dua) danau yaitu danau Sentani dan Danau Paniai yang melibatkan 4 kelompok masyarakat penyelamat ekosistem danau. Manfaat dari kegiatan ini masyarakat sadar dan peduli atas penyelamatan ekosistem danau.

2. Permasalahan dan Solusi

(1) Permasalahan

- (a) Belum terinventarisir kelompok/perorangan penyelamat lingkungan di Provinsi Papua
- (b) Masih kurangnya kader/relawan yang terus memberikan motivasi bagi masyarakat untuk menjaga lingkungan.

(2) Solusi

- (a) Perlu koordinasi dengan kabupaten/kota untuk mendapatkan kelompok/perorangan penyelamat lingkungan.
- (b) Perlu membentuk kader/relawan lingkungan.

3. Dokumentasi

➤ Dokumentasi Kegiatan Pembinaan dan Penilaian Kalpataru



Koordinasi dengan Kepala BLH dan penyerahan dana hibah/ bantuan kepada Kelompok



Kunjungan Lapangan di Kab. Tolikara



Koordinasi dengan Kepala BLH dan penyerahan dana hibah/ bantuan kepada Kelompok Masyarakat



Kunjungan Lapangan di Kab. Jayawijaya

➤ **Dokumentasi Kegiatan Pemberdayaan Institusi Kemasyarakatan dalam Penyelamatan Danau Kabupaten Jayapura**



koordinasi dengan BLH Kabupaten Jayapura



Tim bersama kelompok masyarakat adat Berseri I melakukan pembersihan eceng gondok di 5 lokasi di distrik Sentani Tengah

Kabupaten Paniai



Tim melakukan koordinasi dengan Bapedalda Kabupaten Paniai, sekaligus penentuan kelompok masyarakat adat peduli Danau Paniai



Tim bersama kelompok masyarakat adat melakukan pembersihan eceng gondok di kampung Uwodege

C. Program Peningkatan Kualitas Dan Akses Informasi Sumber Daya Alam Dan Lingkungan

1. Kegiatan

1. Kegiatan Pekan Lingkungan Hidup dengan anggaran sebesar Rp. 473.000.000,- realisasi anggaran sebesar Rp. 465.672.900,- atau 98,45%. Hasil dari kegiatan ini adalah dilaksanakan lomba bagi siswa dari Tingkat TK, SD, SMP, SMA dan Guru serta apel peringatan hari lingkungan hidup tanggal 5 Juni 2015 di Kabupaten Jayapura sedangkan manfaat dari kegiatan ini adalah memberikan pemahaman tentang pelestarian lingkungan dari sejak dini.
2. Penyusunan Status Lingkungan Hidup Daerah dengan anggaran sebesar Rp. 279.520.000,- realisasi anggaran sebesar Rp. 266.410.000,- atau 93,31%. Hasil dari kegiatan ini adalah Pelatihan SILD adalah 3 orang untuk provinsi dan 14 orang untuk kabupaten/kota, pengumpul data SKPD 10 SKPD, Pengumpul data kab/kota 6 kab/kota, Penilaian SLHD 15 kabupaten dan Menyusun 50 Buku SLHD. Manfaat dari kegiatan ini adalah adanya data dan informasi status lingkungan Provinsi Papua.
3. Penyebarluasan Informasi SDA dan LH dengan anggaran sebesar Rp. 312.275.000,- realisasi anggaran sebesar Rp. 281.186.900,- 90,04%. Hasil dari kegiatan ini adalah Pengisian berita website sebanyak 75 kali, penerbitan bulletin cartenz sebanyak 4 kali, Penerbitan buku dengan ISBN sebanyak 4 judul pengisian berita publikasi TV sebanyak 2 kali, Iliflet 5 jenis, baliho dan umbul-umbu 30 buah, kalender 50 buah. Manfaat dari kegiatan ini adalah terbukanya informasi pengelolaan SDA dan LH di Provinsi Papua.
4. Pekan Cinta Puspa dan Satwa Papua dengan anggaran sebesar Rp. 178.250.000,- realisasi anggaran sebesar Rp. 172.960.100,- atau 97,03%. Hasil dari kegiatan ini adalah terbentuknya 4 kelompok Masyarakat Cinta Puspa dan Satwa Papua. Manfaat dari kegiatan ini adalah agar memacu masyarakat peduli pada lingkungan.

2. Permasalahan dan Solusi

(1) Permasalahan

- (a) Belum maksimalnya pengumpulan data di seluruh kabupaten di Provinsi Papua.
- (b) Perlu di bentuk kelompok-kelompok peduli lingkungan yang melestarikan satwa dan puspa di Provinsi Papua.

(2) Solusi

- (a) Perlu membentuk kelompok-kelompok pengumpul data di Kabupaten/Kota se- Provinsi Papua.
- (b) Perlu membentuk kader/relawan lingkungan.

3. Dokumentasi

➤ Dokumentasi Kegiatan Pekan Lingkungan Hidup di Provinsi Papua



Kepala BPLH Prov. Papua memberikan sambutan sekaligus membuka lomba-lomba dalam Pekan LH 2015



Undangan Peserta Apel pada Peringatan Hari LH Sedunia tanggal 5 Juni 2015 di Kabupaten Jayapura



Kegiatan Penanaman Pohon dan Penyerahan hadiah pada Peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia tanggal 5 Juni 2015 di Kabupaten Jayapura

➤ **Dokumentasi Kegiatan Penyusunan Status LH Daerah**



Pemateri dalam Bimbingan Teknis SILHD pada Pengelola SLHD tingkat Kabupaten/Kota Provinsi Papua



Peserta dalam Bimbingan Teknis SILHD pada Pengelola SLHD tingkat Kabupaten/Kota Provinsi Papua

➤ **Dokumentasi Kegiatan Pekan Cinta Puspa dan Satwa Papua
Kabupaten Yahukimo (Pengembangan Anggrek)**



Pengembangan tanaman anggrek oleh kader kelompok Yayak



Ketua (jaket merah) dan anggota kader kelompok Yayak

Kabupaten Paniai



Pengembangan tanaman anggrek oleh kader kelompok Bitu



Ketua dan anggota kader kelompok Bitu

Kabupaten Intan Jaya (Pengembangan Kelinci)



Pengembangan tanaman anggrek oleh kader kelompok Anema



Ketua dan anggota kader kelompok Anema

Kabupaten Kepulauan Yapen (Konservasi Penyu Belimbing)



Konservasi tukik penyu belimbing



Kader kelompok Imbeuri

D. Program Pengembangan Ekowisata dan Jasa Lingkungan di Kawasan-Kawasan Konservasi Laut dan Hutan

1. Kegiatan

1. Pemberdayaan Masyarakat Adat Dalam Pengembangan Ekowisata dengan anggaran sebesar Rp. 229.650.000,- realisasi anggaran sebesar Rp. 225.150.000,- atau 98,04%. Hasil dari kegiatan ini adalah terbentuknya 4 kelompok Masyarakat Adat Dalam Pengembangan Ekowisata, 200 leafle ekowisata, 4 papan ekowisata, 4 dokumenter ekowisata di kabupaten Biak Numfor, Nabire, Merauke, Jayawijaya. Manfaat dari kegiatan ini adalah agar memacu masyarakat peduli pada lingkungan.

2. Permasalahan dan Solusi

(1) Permasalahan

(a) Kelompok masyarakat adat dalam pengembangan ekowisata belum menjangkau seluruh kabupaten/kota

(2) Solusi

(a) Perlu kader/relawan lingkungan khususnya di masyarakat adat.

3. Dokumentasi

Dokumentasi Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Adat Dalam Pengembangan Ekowisata

Kabupaten Biak Numfor



Papan informasi ekowisata



Padang Lamun

Kabupaten Nabire



Papan informasi ekowisata



Sunset di Teluk Kimi Nabire

Kabupaten Merauke



Papan informasi ekowisata



Potensi sarang semut yang tumbuh di pohon mangrove

Kabupaten Jayawijaya



Papan informasi ekowisata



Jenis kopi Wamena

E. Program Pengembangan Kapasitas Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup

1. Kegiatan

1. Pembentukan Pos Pengaduan LH Papua dengan anggaran sebesar Rp. 337.350.000,- realisasi anggaran sebesar Rp. 321.750.900,- atau 95,38%. Hasil dari kegiatan ini adalah terbentuknya 6 Pos Pengaduan di Kabupaten Nabire, Merauke, Mimika, Jayawijaya, Jayapura dan Biak Numfor. Manfaat dari kegiatan ini adalah agar masyarakat semakin dekat dalam memberikan aduan kepada pemerintah tentang kasus lingkungan di wilayahnya
2. Pembinaan dan Pengawasan Komisi Amdal Kabupaten/Kota dengan anggaran sebesar Rp.198.250.000,- realisasi anggaran sebesar Rp. 142.384.400 atau 71,82%. Hasil dari Kegiatan ini adalah melaksanakan pengawasan dan pembinaan melalui evaluasi proses administrasi dan mutu dokumen di Komisi Penilai AMDAL Kabupaten Jayapura, Kota Jayapura, Kabupaten Merauke, Kabupaten Nabire, Kabupaten Biak Numfor. Manfaat dari kegiatan ini adalah agar Komisi Penilai AMDAL Kabupaten/Kota semakin komprehensif dokumen AMDAL.
3. Rakoornis Lingkungan Hidup Provinsi Papua dengan anggaran sebesar Rp.923.161.610,- realisasi anggaran sebesar Rp. 900.960.900 atau 97,60%. Hasil dari Kegiatan ini adalah mensinkronkan dan mengevaluasi program pengelolaan lingkungan serta meningkatkan kerjasama dan peran aktif instansi lingkungan hidup dalam pengelolaan lingkungan di Provinsi Papua. Manfaat dari kegiatan ini adalah adanya kesepakatan kerjasama pengelolaan lingkungan hidup secara terpadu dengan teridentifikasinya permasalahan lingkungan hidup di Provinsi Papua.
4. Penilaian Dokumen LH 10 Kegiatan Wajib AMDAL dengan anggaran sebesar Rp.318.750.000,- realisasi anggaran sebesar Rp. 288.844.510 atau 90,62%. Hasil dari Kegiatan ini adalah melaksanakan penilaian dokumen AMDAL dan administrasi dokumen AMDAL yang akan dinilai oleh Komisi Penilai AMDAL Provinsi Papua. Manfaat dari kegiatan ini adalah dokumen lingkungan yang layak lingkungan untuk mendapatkan ijin lingkungan .
5. Penyusunan Naskah Akademik dan Draf Raperda Laboratorium Lingkungan Hidup Papua dengan anggaran sebesar Rp.146.000.000,- realisasi anggaran sebesar Rp. 46.000.000,- atau 31,51%. Hasil dari Kegiatan ini tidak dilaksanakan penyusunan naskah akademik dan draf Raperda Laboratorium Lingkungan.
6. Pembentukan Kaukus Lingkungan Hidup Provinsi dengan anggaran sebesar Rp.597.700.000,- realisasi anggaran sebesar Rp. 568.700.000,- atau 95,15%. Hasil dari Kegiatan ini melaksanakan bimbingan teknis pengelolaan lingkungan hidup bagi anggota legislative DPRP Papua sebanyak 10 orang didampingi oleh

5 orang pejabat dari BPLH Provinsi Papua namun belum membentuk Kaukus Lingkungan Hidup Provinsi.

2. Permasalahan dan Solusi

(1) Permasalahan

- (a) Belum terbentuknya komisi Penilai AMDAL Kabupaten yang terakreditasi untuk menilai dokumen AMDAL di Kabupaten.
- (b) Belum semua kabupaten di Provinsi Papua yang memiliki instansi Lingkungan Hidup
- (c) Belum adanya Laboratorium Lingkungan yang terakreditasi.
- (d) Belum dikukuhkannya Kaukus Lingkungan Hidup Provinsi Papua.

(2) Solusi

- (a) Perlu dibentuk klaster Komisi Penilai AMDAL Kabupaten untuk mewakili masing-masing wilayah adat agar lebih efektif dan efisien dalam menilai dokumen AMDAL di wilayah tersebut, sehingga tidak lagi ke Komisi Penilai AMDAL Provinsi.
- (b) Perlu komitmen yang tinggi bagi Pimpinan Daerah untuk menjaga lingkungan salah satunya dengan membentuk instansi lingkungan di wilayahnya.
- (c) Saat ini laboratorium lingkungan Provinsi baru selesai dibangun dan melengkapi sarana dan prasarana laboratorium.
- (d) Perlu koordinasi lebih intensif dengan anggota Legislatif DPR Papua untuk dikukuhkannya Kaukus melalui siding paripurna DRP Papua.

3. Dokumentasi

➤ Dokumentasi Kegiatan Pembentukan Pos Pengaduan Lingkungan Hidup Papua Kabupaten Merauke



Pemasangan Spanduk Pos Pengaduan di BLH Kabupaten Merauke



Mempresentasikan Pembentukan Pos Pengaduan ke BLH Kabupaten Merauke

Kabupaten Nabire



Presentasi yang dihadiri pegawai BLH Kabupaten Nabire



Peserta BLH Kabupaten Nabire mendengarkan penjelasan Tim BPLH Provinsi Papua

Kabupaten Biak Numfor



Pemaparan Presentasi Pembentukan Pos Pengaduan di BLH Kabupaten Biak

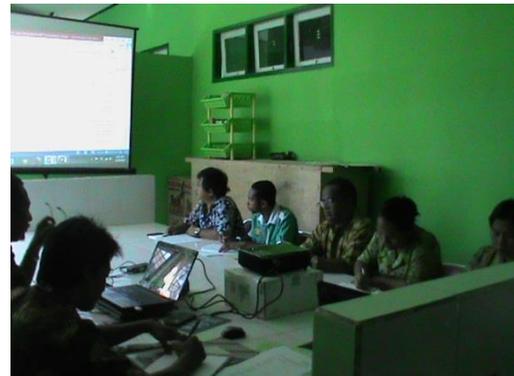


Peserta BLH Kabupaten Biak Memperhatikan presentasi Pembentukan Pos Pengaduan

Kabupaten Mimika



Pemasangan Spanduk Pos Pengaduan di BLH Kabupaten Mimika



Pemaparan Presentasi Pembentukan Pos Pengaduan di BLH Kabupaten Mimika

➤ **Dokumentasi Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Komisi AMDAL Kab/Kota Kabupaten Biak Numfor**



Pembinaan Komisi Penilai AMDAL di Kabupaten Biak Numfor

Kabupaten Nabire



Pembinaan Komisi Penilai AMDAL di Kabupaten Nabire

➤ **Dokumentasi Kegiatan Rakoornis Lingkungan Hidup Provinsi Papua**



Pembukaan Kegiatan Rakoornis LH Provinsi Papua dan Pemukulan gong oleh Assisten II di dampingi oleh Kepala-kepala BLH Kabupaten/Kota se-Provinsi Papua



Materi Penguatan Kapasitas kelembagaan Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Serta Perizinan Lingkungan Dengan narasumber: **Dr. Henry Bastaman, MES** Deputi Bidang Pembinaan Sarana Teknis Lingkungan dan Peningkatan Kapasitas Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia didampingi Kepala PPE Bali-Nusra **Novrizal**, dengan moderator **Dr. Ir. Noak Kapisa, M.Sc** Kepala BPLH Provinsi Papua



Klinik konsultasi dengan Sekretaris BPLH dan Kasubbag Program mengenai Program dan permasalahannya yang dihadapi di

Klinik konsultasi dgn Kabid & Kasubbid Bid Pengawasan & Penanggulangan Penc. membahas mengenai Pengawasan LH di Kab/Kota,



Klinik konsultasi dgn Kabid & Kasubbid Bidang Pengelola Kualitas

Klinik konsultasi dengan Kepala Bidang dan Kasubbid Bidang Pengendalian Dampak Lingkungan

Klinik konsultasi dgn Kabid & Kasubbid Bidang Pengembangan



Ramah tamah peserta Kab/Kota se-Prov Papua dgn Kadis Kebersihan & Pertamanan Kab badung beserta staf & sekaligus pengenalan mengenai Prog GELATIK



Mengunjungi Bank Sampah Kota Mangupura & melihat cara Pengolahan sampah plastik menjadi bahan bakar)



Penanaman pohon kayu besi & kayu suang di area khusus penanaman pohon kantor pemerintah kab Badung oleh Kepala BLH Kab/Kota se-Prov.Papua



Mengunjungi Desa Sadar Lingkungan (Desa Taman, Abiansemal) sekaligus melihat pengolahan limbah kotoran hewan ternak menjadi energi (biogas)



Penyerahan Rekomendasi Hasil Rakoornis Bid. Lingkungan Hidup Tahun 2015 se-Provinsi Papua dan Penutupan Rakoornis Bidang Lingkungan Hidup Tahun 2015 se-Provinsi Papua di Bali diakhiri dengan menyanyikan lagu Tanah Papua dan Foto bersama.

➤ **Dokumentasi Kegiatan Penilaian Dokumen LH 10 Kegiatan Wajib AMDAL**



Kegiatan Konsultasi Publik Ruas jalan Taja-Lere



Konsultasi Publik di Mappi untuk kegiatan PT. Indofood Grup



Laporan Ketua Tim Teknis pada rapat Komisi Penilai AMDAL untuk kegiatan Pembangunan PLTM Oksibil



Penjelasan pemrakarsa (Dirjen Perhubungan Udara) pada rapat DELH

➤ **Dokumentasi Kegiatan Pembentukan Kaukus LH Provinsi**



Kepala BPLH Prov. Papua Memberikan arahan



Foto Bersama dgn Kepala PLSH UGM setelah Kegiatan

F. Program Mitigasi dan Adaptasi Dampak Perubahan Iklim

1. Kegiatan

1. Pengelolaan Sampah di Kabupaten/Kota (Pilot Project) dengan anggaran sebesar Rp. 315.750.000,- realisasi anggaran sebesar Rp. 315.871.000,- atau 99,41%. Hasil dari kegiatan ini adalah terbentuknya 3 Kelompok pengelola sampah dengan menggunakan metode 3 R (Reduce, Reuse, Recycle) dan di bagi 21 Komposter, 21 keranja takakura dan 21 tempat sampah 3R di kabupaten Mimika, Jayapura, dan Biak Numfor. Manfaat dari kegiatan ini adalah agar masyarakat dapat mengurangi timbunan sampah (reduce), memanfaatkan sampah (reuse) dan melakukan daur ulang sampah (recycle) secara mandiri.

2. Pemberdayaan Masyarakat Adat dalam Adaptasi dan Mitigasi Tanaman Buah Merah di 5 Wilayah dengan anggaran sebesar Rp. 1.088.250.000,- realisasi anggaran sebesar Rp. 1.068.657.500,- atau 98,20%. Hasil dari kegiatan ini adalah terbentuknya 16 kelompok masyarakat adat peduli lingkungan yang terdiri dari 7 kelompok penyelamat buah merah di kabupaten Jayawijaya, Tolikara, Yahukimo, Mamberamo Tengah dan Pegunungan Bintang; 5 kelompok penyelamat hutan mangrove di kabupaten Mimika, Merauke, Biak Numfor, Kepulauan Yapen, Kota Jayapura; 2 kelompok penyelamat hutan sagu di kabupaten Mamberamo Raya dan Kab. Jayapura; 2 kelompok penyelamat KEHATI (kopi dan gaharu) di Kabupaten Jayawijaya dan Biak Numfor. Manfaat dari kegiatan ini adalah komitmen masyarakat dalam pengelolaan lingkungan dan terjaganya kearifan local masyarakat adat.

2. Permasalahan dan Solusi

(1) Permasalahan

- (a) Belum terjangkaunya seluruh kabupaten di Provinsi Papua dalam pengelolaan sampah dan pemberdayaan masyarakat dalam adaptasi dan mitigasi.

(2) Solusi

- (a) Perlunya kader dan motivator lingkungan bagi masyarakat di seluruh Provinsi Papua untuk menjaga, memelihara, mengelola lingkungan hidup, mengingat terbatasnya dana, sumberdaya manusia, bagi penyelamatan dan pengelolaan lingkungan hidup di Provinsi Papua.

3. Dokumentasi

➤ Dokumentasi Kegiatan Pengolahan Sampah di Kab/Kota (Pilot Project)

Kabupaten Mimika



Penyerahan komposter, takakura dan tempat sampah 3 R ke BLH Kabupaten Mimika



Sosialisasi Penggunaan Alat Takakura & Komposter Kepada Para Kader Di Distrik Mimika Baru

Kabupaten Jayapura



Penyerahan komposter, takakura dan tempat sampah 3 R ke BLH Kabupaten Jayapura



Pemasangan Komposter di RT 02 RW 03 Kampung Doyo Baru Kabupaten Jayapura

Kabupaten Biak Numfor



Penyerahan komposter, takakura dan tempat sampah 3 R ke BLH Kabupaten Biak Numfor



Pemasangan Komposter di Kampung Mandauw Distrik Samofa Kabupaten Biak Numfor

➤ **Dokumentasi Kegiatan Perberdayaan Masyarakat Adat dalam Adaptasi dan Mitigasi Tanaman Buah merah di 5 wilayah Kabupaten Waropen (Penanaman Mangrove)**



Penandatanganan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan, Faktur Tagihan dan Kwitansi



Tim dengan kelompok masyarakat adat

Kota Jayapura



Penandatanganan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan, Faktur Tagihan dan Kwitansi



Lokasi/Areal Kegiatan Kelompok masyarakat Adat

Kabupaten Timika



Penandatanganan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan, Faktur Tagihan dan Kwitansi



Lokasi/Areal Kegiatan Kelompok masyarakat Adat

Kabupaten Merauke



Tim melakukan koordinasi dengan BLH Kabupaten Merauke



Lokasi/Areal Kegiatan Kelompok Masyarakat Adat

Kabupaten Biak Numfor



Tim melakukan koordinasi dengan BLH Kabupaten Biak Numfor



Lokasi/Areal Kegiatan Kelompok Masyarakat Adat

Kabupaten Jayapura (Penyelamat Pohon Sagu)



Tim melakukan pertemuan dengan kelompok masyarakat



Lokasi/Areal Kegiatan Kelompok Masyarakat Adat

Kabupaten Mamberamo Raya



Penandatanganan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan, Faktur Tagihan dan Kwitansi serta penyerahan uang secara tunai



Lokasi/Areal Kegiatan Kelompok Masyarakat Adat

Kabupaten Biak Numfor (Gaharu)



Tim melakukan pertemuan dengan Kelompok Masyarakat Adat



Penandatanganan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan, Faktur Tagihan dan Kwitansi

Kabupaten Jayawijaya (Kopi)



Tim melakukan pertemuan dengan Kelompok Masyarakat Adat



Lokasi/Areal Kegiatan Kelompok Masyarakat Adat

Kabupaten Jayawijaya (Buah Merah)



Tim melakukan pertemuan dengan Kelompok Masyarakat Adat



Penandatanganan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan, Faktur Tagihan dan Kwitansi

Kabupaten Yahukimo



Penandatanganan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan, Faktur Tagihan dan Kwitansi



Tim melakukan pertemuan dengan Kelompok Masyarakat Adat

Kabupaten Tolikara



Tim melakukan pertemuan dengan Kelompok Masyarakat Adat



Lokasi/Areal Kegiatan Kelompok Masyarakat Adat

Kabupaten Pegunungan Bintang



Tim melakukan pertemuan dengan Kelompok Masyarakat Adat



Penandatanganan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan, Faktur Tagihan dan Kwitansi

Kabupaten Mamberamo Tengah



Tim melakukan pertemuan dengan Kelompok Masyarakat Adat



Penandatanganan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan, Faktur Tagihan dan Kwitansi

**KEPALA BADAN PENGELOLA
LINGKUNGAN HIDUP PROVINSI PAPUA,**

**Dr. Ir. NOAK KAPISA, M.Sc
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 19581122 198703 1 001**